

## Bantuan Keuangan Pemprov Banten pada 2024 untuk Kota Serang Turun

SERANG (IM)- Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten untuk Kota Serang pada 2024 turun yakni sebesar Rp16 miliar dibandingkan 2023 yang sebesar Rp25 miliar.

Pj Wali Kota Serang, Yedi Rahmat di Serang, Banten, Selasa (6/2), mengatakan, pihaknya sudah mengusulkan kepada Pemprov Banten agar bantuan itu ditambah. "Bantuan keuangan untuk kota Serang pada tahun 2024 ini diketahui menurun dari yang tadinya Rp25 miliar menjadi Rp16 miliar," katanya.

Ia mengatakan beberapa program pembangunan membutuhkan dana bantuan itu termasuk pembangunan jalan. "Salah satunya pembangunan ruas jalan yang juga sempat diusulkan bantuan pendanaan langsung kepada Kementerian PUPR RI," katanya.

Ia mengatakan ada sekitar 12 ruas jalan yang diusulkan yang totalnya membutuhkan

dana sekitar Rp191 miliar. "Jika kita mengandalkan bantuan anggaran dari Pemerintah Provinsi masih kurang, sehingga kita juga usulkan ke pemerintah pusat," katanya.

Sementara itu, Kepala Bappeda Kota Serang, Ina Linawati mengatakan Bantuan Keuangan dari Pemprov Banten pada tahun 2024 masih kurang untuk Pemerintah Kota Serang yang mengemban status sebagai Ibu Kota Provinsi Banten. "Kami masih menunggu surat resmi untuk Kota Serang terkait penyaluran Bantuan Keuangan tersebut secara resmi," katanya.

Ia berharap Bantuan Keuangan Provinsi ini dapat lebih besar dari yang diharapkan karena Kota Serang sebagai etalase dan wajah ibu kota Provinsi Banten. "Kemampuan keuangan Kota Serang masih bergantung sekali dengan dana bantuan transfer baik itu dari pusat maupun dari provinsi," katanya. ● **pra**

## Disnaker Lebak Berangkatkan Ratusan Tenaga Kerja Migran ke 12 Negara

LEBAK (IM)- Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lebak, Banten memberangkatkan sebanyak 331 tenaga kerja migran sepanjang tahun 2023 ke 12 negara di Benua Asia, Eropa dan Afrika.

"Kami meyakini dengan pemberangkatan tenaga migran itu tentu dapat mengurangi tingkat pengangguran," kata Kepala Penempatan Perluasan dan Pelatihan Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lebak, Sela (6/2).

Pemerintah Kabupaten Lebak mengharapkan semua para tenaga kerja migran ke luar negeri jangan sampai pemberangkatannya ilegal. Saat ini, masyarakat sudah menyadari pentingnya pemberangkatan kerja ke luar negeri melalui jalur resmi atau legal dan tercatat di Disnaker setempat.

Keuntungan pemberangkatan pada perusahaan legal di luar negeri itu, tentu dilindungi oleh pemerintah Indonesia juga oleh perusahaan bersangkutan. "Kami minta tenaga kerja migran itu wajib legal, karena dilindungi pemerintah dan perusahaan yang memberangkatkan," kata Deni.

Menurut dia, dari 331 tenaga kerja migran asal Kabupaten Lebak itu bekerja ke 11 negara di Asia, Eropa dan Afrika antara lain Arab Saudi, Brunei Darussalam, Korea Selatan, Qatar, Kuwait, Jepang, Malaysia, Singapore, Hongkong, Taiwan, Slovakia dan Zambia.

Mereka bekerja pada sektor formal dan non formal, seperti perawat bayi, lansia, salon aksesoris kendaraan, penjaga toko, pabrik, perbengkelan asisten rumah tangga, sopir dan lainnya. Keberangkatan mereka bekerja di luar negeri itu melalui Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) yang mengantongi izin dari Kementerian Tenaga Kerja.

Para tenaga kerja migran itu dengan memiliki pendidikan dari SD, SLTA dan Perguruan Tinggi. "Kami berharap tenaga kerja migran dapat melaksanakan tugas dengan baik dan bisa meningkatkan kesejahteraan keluarganya," katanya menjelaskan.

Ia mengatakan, para tenaga kerja migran itu sebelum keberangkatan ke berbagai negara itu sudah memiliki kompetensi sesuai kebutuhan tenaga kerja di negara tersebut. Selain itu juga mereka para tenaga migran mampu menguasai bahasa negara yang dituju.

Sebab, Pemerintah Kabupaten Lebak memiliki Gedung Balai Latihan Kerja (BLK) dengan kolaborasi bersama salah satu Lembaga Pendidikan Ketrampilan di Jakarta. "Kami tentu semua tenaga pekerjanya migran itu wajib memiliki kompetensi dan sertifikasi sesuai permintaan dari negara itu agar mereka bekerja lebih profesional," katanya menjelaskan. ● **pra**



### JALAN UTAMA SEMARANG-PURWODADI LUMPUH KARENA BANJIR

Kondisi jalur utama jalan Semarang-Purwodadi tergenang banjir di Kec. Gubug, Grobogan, Jateng, Selasa (6/2). Banjir karena intensitas hujan deras pada Senin (5/2) sore hingga Selasa (6/2) dini hari tersebut menyebabkan meluapnya Sungai Tuntang serta jebolnya beberapa tanggul sungai sehingga jalur utama jalan Semarang-Purwodadi lumpuh. TNI dan POLRI bersama BPBD dibantu relawan mengalihkan arus lalu lintas ke sejumlah titik jalan alternatif.

## Integritas KPU Lebak Diragukan, Dinilai Banyak Intrik Kepentingan

Integritas anggota baru KPU yang dinilai banyak intrik kepentingan. Hal ini karena proses rekrutmen anggota KPU diduga sarat dengan kepentingan partai. Terlebih lagi, Ketua KPU Lebak yang baru, Dewi Hartini, dianggap tidak memiliki pengalaman yang memadai di bidang kepemiluan.

LEBAK (IM)- Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah melantik lima anggota KPU Lebak periode 2024-2029, yakni, Agus Sugama, Ade Jurkoni, Deni Wahyudin, Dewi Hartini, dan Im Muhaemin.

Dari lima anggota KPU Lebak yang terpilih,

satu di antaranya merupakan petahana, yakni Agus Sugama.

Dua orang lainnya berasal dari mantan anggota Bawaslu Lebak, yakni Ade Jurkoni dan Deni Wahyudin.

Sementara, ada dua wajah baru yang menjadi

komisioner, yakni Im Muhaemin dan Dewi Hartini.

Namun, terpilihnya lima anggota KPU Lebak baru tersebut diragukan banyak pihak, di antaranya, aktivis HMI MPO Cabang Lebak, Sahrul Gunawan.

Sahrul Gunawan meragukan integritas anggota baru KPU yang dinilai banyak intrik kepentingan.

"Saat ini, kita pesimis bahwa Pemilu 2024 akan berjalan dengan baik, jujur, dan adil. Proses rekrutmen anggota KPU diduga sarat dengan kepentingan partai. Terlebih lagi, Ketua KPU Lebak yang baru, Dewi Hartini, dianggap tidak memiliki pengalaman yang memadai di bidang kepemiluan," ujar Sahrul Gunawan, Selasa (6/2).

Diungkapkan Sahrul, ia berkomitmen untuk mengawal kinerja KPU Lebak yang baru saja dilantik. Selain itu, jika terbukti adanya komisioner KPU yang tidak menjalankan tugasnya secara profesional, "Kita akan terus kawal. Apalagi mendekati Pemilu 2024 saat ini memasuki masa yang sangat krusial, dan hanya sembilan hari lagi menuju pencoblosan," tegas Sahrul.

Lebih lanjut, Sahrul berharap agar KPU Lebak dapat membuktikan kualitas dan integritasnya dalam mengelola proses pemilihan yang demokratis dan transparan.

"Jangan sampai isu-isu kepentingan yang menghantui terbukti dan melukai hati masyarakat Kabupaten Lebak," tuturnya.

Sementara itu, Ketua KPU Lebak, Dewi Hartini, saat dikonfirmasi belum bisa memberikan tanggapannya.

"Saya masih ada rapat," kata Dewi.

Lebih lanjut, Dewi menyampaikan, akan memberikan keterangan dan info lebih lanjut terkait hal tersebut. ● **pra**

LEBAK (IM)- Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lebak, Banten memberangkatkan sebanyak 331 tenaga kerja migran sepanjang tahun 2023 ke 12 negara di Benua Asia, Eropa dan Afrika.

"Kami meyakini dengan pemberangkatan tenaga migran itu tentu dapat mengurangi tingkat pengangguran," kata Kepala Penempatan Perluasan dan Pelatihan Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lebak, Sela (6/2).

Pemerintah Kabupaten Lebak mengharapkan semua para tenaga kerja migran ke luar negeri jangan sampai pemberangkatannya ilegal. Saat ini, masyarakat sudah menyadari pentingnya pemberangkatan kerja ke luar negeri melalui jalur resmi atau legal dan tercatat di Disnaker setempat.

Keuntungan pemberangkatan pada perusahaan legal di luar negeri itu, tentu dilindungi oleh pemerintah Indonesia juga oleh perusahaan bersangkutan. "Kami minta tenaga kerja migran itu wajib legal, karena dilindungi pemerintah dan perusahaan yang memberangkatkan," kata Deni.

Menurut dia, dari 331 tenaga kerja migran asal Kabupaten Lebak itu bekerja ke 11 negara di Asia, Eropa dan Afrika antara lain Arab Saudi, Brunei Darussalam, Korea Selatan, Qatar, Kuwait, Jepang, Malaysia, Singapore, Hongkong, Taiwan, Slovakia dan Zambia.

## Kab. Bogor Tuan Rumah Pencanangan Gerakan Tanam Cabai Se-Indonesia

BOGOR (IM)- Kabupaten Bogor siap menjadi tuan rumah pencanangan Gerakan Tanam Cabai (Gertam Cabai) serentak se-Indonesia dalam rangka Hari Kesatuan Gerak Pembangunan Kesejahteraan Keluarga (PKK) ke-52 tingkat nasional.

Rapat pembahasan persiapan dipimpin langsung oleh Pj. Ketua TP PKK Kabupaten Bogor, Siti Chomzah, di Ruang Rapat I, Sekretariat Daerah, Cibinong, Senin (5/2).

Kegiatan pencanangan Gertam Cabai serentak seluruh Indonesia rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 4 Maret 2024. Kegiatan ini bertujuan untuk memasyarakatkan gerakan tanam cabai kepada masyarakat. Di mana cabai

menjadi salah satu komoditas yang kerap memberikan dampak kepada inflasi setiap tahunnya.

Hadir pada rapat secara virtual, perwakilan pengu-ru TP PKK Pusat. Hadir secara langsung, Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asekbang) beserta jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor.

Selain pencanangan Gertam Cabai, akan diadakan juga Gerakan Pangan Murah, dan kampanye stop boros pangan, dan kegiatan lainnya.

Pj. Ketua TP PKK Kabupaten Bogor, Siti Chomzah mengungkapkan, hari ini kita melaksanakan rapat persiapan dalam rangka pencanangan Gerakan Tanam Cabai (Gertam Ca-

bai) serentak se-Indonesia. Ia menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kepercayaan memilih Kabupaten Bogor sebagai tuan rumah.

"Terima kasih kepada Ketua Umum TP PKK Pusat yang sudah memilih Kabupaten Bogor sebagai tuan rumah pencanangan Gertam Cabai yang dirangkaikan dengan Hari Kesatuan Gerak PKK ke-52.

Siti menambahkan, Kabupaten Bogor insya Allah siap menjadi tuan rumah, dan sudah menyiapkan lokasi kegiatan yang tentunya representatif," ungkap Siti Chomzah. Selanjutnya segala persiapan akan terus dimatangkan demi suksesnya kegiatan tersebut. ● **gio**

## 292 Nakes Kab. Tangerang Disiapkan Dampingi Petugas KPPS dan PPS

TANGERANG (IM)- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang, Banten, menyiapkan sebanyak 292 tenaga kesehatan (nakes) untuk mendampingi petugas Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara (KPPS) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilu 2024 di tempat pemungutan suara (TPS).

"Untuk mendukung penyelenggaraan pemilu, kami dari Dinas Kesehatan mengerahkan 202 petugas medis," kata Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang, Achmad Muchlis di Tangerang, Banten, Selasa (6/2).

Menurut Muchlis, pengerahan tenaga medis dari pemerintah daerah bertujuan untuk membantu kelancaran proses pemungutan suara, dengan memantau kesehatan para petugas KPPS dan PPS.

Dalam hal ini, lanjutnya, Dinkes Kabupaten Tangerang bersama pihak-pihak terkait telah membentuk tim kesiapsiagaan yang akan bertugas di seluruh TPS guna memantau kesehatan petugas KPPS dan PPS terkait data hasil skrining riwayat kesehatan.

"Petugas medis ini disiapkan sebagai upaya menindaklanjuti pemetaan risiko kerja petugas penyelenggara pemilu," tambahnya.

Sebanyak 292 nakes

yang disiapkan itu terdiri atas 90 dokter, 110 perawat, dan 92 pengemudi mobil ambulans. Mereka akan ditugaskan di setiap posko di 29 kecamatan di Kabupaten Tangerang.

"Tim mobile di setiap kecamatan dan posko pemilu untuk memberikan pelayanan pegawai. Kami juga telah berkoordinasi dengan RSUD dan RS swasta sebagai tempat rujukan perawatan," kata Muchlis.

Dia pun mengimbau seluruh petugas KPPS dan PPS untuk menjaga kesehatan dengan istirahat dan konsumsi asupan bergizi yang cukup.

"Kami hanya menyarankan para petugas penyelenggara nantinya agar bisa menjaga stamina dengan beristirahat yang cukup dan bisa mengonsumsi makanan bergizi," ujarnya.

KPU Kabupaten Tangerang telah menetapkan daftar pemilih tetap berkelanjutan yang diperbarui sebanyak 2.353.825 jiwa, dengan rincian 1.188.969 laki-laki dan 1.164.856 perempuan. Data itu diambil dari Pemilu 2019 yang telah dipadukan dengan data kependudukan secara nasional.

Pada Pemilu 2024, KPU Kabupaten Tangerang menetapkan sebanyak 9.016 TPS yang tersebar pada 274 desa dan kelurahan. ● **pp**



Kabupaten Bogor tuan rumah pencanangan gerakan tanam cabai se-Indonesia.



### PRODUKSI KUE KERANJANG MINI DI MALANG

Perajin mengemas kue keranjang berukuran mini di Banana Leaf Catering, Sukoharjo, Malang, Jatim, Selasa (6/2). Permintaan makanan yang biasa disajikan warga Tionghoa saat Tahun Baru Imlek tersebut sejak sebulan terakhir mencapai 200 kotak dan dijual Rp45 - 55 ribu.

## Soal IRH, Kemenkumham Banten Siap Lakukan Pendampingan bagi Pemda

SERANG (IM)- Dalam rangka penilaian Indeks Reformasi Hukum, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten mempersiapkan dengan rapat evaluasi dan persiapan kegiatan Indeks Reformasi Hukum (IRH) 2024.

Kepala Kantor Wilayah, Dodot Adikoeswanto di Serang, Selasa (6/2), menyampaikan bahwa dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi yang efektif, efisien, terukur dan konsisten perlu diselenggarakan indeks reformasi hukum.

"Indeks Reformasi Hukum memiliki peran sentral dalam mengukur kemajuan dan efektivitas reformasi hukum di Indonesia, karenanya langkah persiapan ini menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan perubahan positif di sektor hukum," kata Dodot dalam keterangan resminya.

Kemenkumham melalui Badan Strategi Kebijakan merupakan leading sector dalam tingkat pelaksanaan program Meso di bidang reviu atau penilaian terhadap berbagai peraturan

perundang-undangan.

Sementara itu, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Meidy Firman, menyebutkan dengan rapat ini menjadi bentuk komitmen Kemenkumham Banten dalam melakukan pendampingan. "Ini merupakan komitmen Kemenkumham Banten dalam melakukan pendampingan bagi pemerintah daerah (pemda) dalam pengisian data dukung Indeks Reformasi Hukum," ujar Meidy.

Meidy pun menyebutkan penilaian pada Indeks Reformasi Hukum meliputi 4 (empat) variabel. Pertama, memperkuat koordinasi dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk melakukan harmonisasi regulasi. Kedua, peningkatan kompetensi Aparatur Sipil Negara sebagai Perancang Peraturan Perundang-undangan di tingkat pusat dan daerah yang berkualitas.

Ketiga, mendorong kualitas regulasi atau deregulasi sebagai peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil reviu. Dan Keempat, Penataan database Peraturan perundang-undangan. ● **pra**